





**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

---

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc  
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN  
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul

: KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM  
PIDANA YANG BERKEADILAN DALAM  
PENANGANAN *ILLEGAL FISHING*  
OLEH KORPORASI ASING

**Disusun Oleh Mahasiswa:**

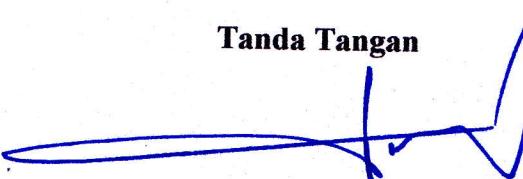
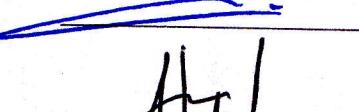
**Nama : Agung Imam Santoso**

**NIM : 23730589**

**Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum**

Tanda Tangan

Tanggal

  
30/20  
30/8-7

**Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M**  
Promotor

**Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si**  
Ko-Promotor

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana Universitas Borobudur

  
**Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.**  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP**  
**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Nama : Agung Imam Santoso

NIM : 23730589

No.	Nama Pengaji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc</b>		04/08/25
2.	<b>Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M</b>		30/8/25
3.	<b>Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si</b>		30/8/25
4.	<b>Dr. dr. Yeni Nuraeni S.H., M.H., MMRS</b>		30/8/25
5.	<b>Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H</b>		30/8/25
6.	<b>Prof. Dr. Henny Nuraeni, S.H., M.H</b>		

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Agung Imam Santoso lahir di Jakarta pada 1 September 1974 anak 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara dari Slamet (Bapak) dan Sumarmi (Ibu). Menikah pada tahun 2003 dengan Siti Sundari dan dikarunia anak 3 (tiga) yaitu Aninda Nabila Putri, Ananda Fayyas Athar dan Ananda Azzam Ramadhan. Pada tahun 1982 penulis memasuki Sekolah Dasar SDN Kebon Pala Jakarta Timur tamat tahun 1988, selanjutnya melanjutkan ke SMPN 210 Ciracas Jakarta Timur tamat tahun 1991, selanjutkan melanjutkan ke SMK Angkasa Jakarta Timur tamat tahun 1994. Pada tahun 1997 penulis melanjutkan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta tamat tahun 2001 kemudian tahun 2015 melanjutkan ke Pendidikan Program Pasca sarjana Universitas Mpu Tantular tamat tahun 2017. Penulis berprofesi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari tahun 1996 sampai sekarang di Pusdik Polair Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri sebagai Gadik dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan dan kejahatan ekonomi.

Sebagai seorang akademisi dan praktisi hukum, penulis telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang berkontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Beberapa jurnal yang telah penulis terbitkan antara lain "*Public Prosecutor's Cassation Submission Criminal Case of Issuing Tax Invoices that are not in Accordance with The Transaction*" (ICLSSEE) 25 Mei 2024 dan "*Legal Principles in Utilizing Fish Resources in the ZEEI to Make Indonesia World Maritime Axis* 2 Oktober 2023, serta "*The Urgency of Money Laundering Crime Policy Reform in the Implementation of Digital Rupiah in Indonesia*" 26 Oktober 2024. Melalui tulisan-tulisannya, penulis berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang berkembang, khususnya dalam ranah ekonomi dan Maritim.

Dengan latar belakang akademik dan pengalaman profesional yang luas, Penulis terus berkontribusi dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Dalam memperkuat sistem hukum nasional, baik dalam aspek penegakan hukum maupun kebijakan publik, menunjukkan komitmennya dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Keaktifannya dalam penelitian serta perannya di Polri menjadikannya sosok yang memiliki pemahaman mendalam terhadap berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh negara, terutama dalam bidang kejahatan ekonomi dan pelanggaran di sektor Maritim.

## ABSTRAK

**Disertasi, Agung Imam Santoso:** dengan judul “**KONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN DALAM PENANGANAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KORPORASI ASING**”, disertasi ini dibawah bimbingan Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., selaku Promotor, dan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si selaku Ko-Promotor.

Penelitian ini berfokus pada urgensi pengaturan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang melibatkan korporasi asing, tantangan dalam penegakan hukumnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, serta langkah reformasi hukum pidana yang dapat dilakukan untuk memperkuat pertanggungjawaban korporasi asing dan menciptakan efek jera yang lebih efektif. *Illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing maupun yang terafiliasi dengan korporasi asing telah menyebabkan eksloitasi sumber daya laut Indonesia, menimbulkan kerugian ekonomi, dan merusak ekosistem laut. Meskipun terdapat berbagai regulasi nasional dan konvensi internasional yang mengatur tentang penindakan terhadap praktik *illegal fishing*, belum adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban hukum bagi korporasi asing menghambat efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini membahas tiga fokus utama: pertama, arah kebijakan hukum pidana yang berkeadilan dalam penanganan tindak pidana *illegal fishing* oleh korporasi asing di Indonesia; kedua, tantangan penegakan hukum pidana yang berkeadilan terhadap korporasi asing yang terlibat dalam tindak pidana *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia; dan ketiga, konstruksi kebijakan hukum pidana yang ideal dan berkeadilan untuk memperkuat pertanggung jawaban serta efek jera terhadap korporasi asing pelaku *illegal fishing*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional terkait perikanan, serta studi perbandingan dengan negara lain dalam menangani *illegal fishing* yang melibatkan korporasi asing. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal akademik, laporan penelitian), serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan pakar hukum perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam menangani korporasi asing yang terlibat dalam *illegal fishing*. Beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum meliputi kompleksitas yurisdiksi internasional, keterbatasan dalam identifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*), serta hambatan dalam menindak kapal asing yang kerap berpindah-pindah wilayah perairan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana yang mencakup perumusan regulasi khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi asing dalam kasus *illegal fishing*, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kerja sama internasional guna mengefektifkan sanksi terhadap korporasi asing yang terbukti melakukan praktik *illegal fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia.

**Kata Kunci:** *Illegal Fishing*, Korporasi Asing, Reformasi Hukum Pidana, Politik Hukum, Penegakan Hukum